



# POLICY BRIEF

**UMKM : DARI PENYANGGA EKONOMI LOKAL  
MENUJU FONDASI KETAHANAN EKONOMI DAERAH**

**PKN TK II ANGKATAN XXI TAHUN 2025**





# TIM PENYUSUN - KELOMPOK 2



Astuti, S.Pd., M.Si.



Agustian Pahrimala, S.H., M.H.



Bahori, AP., M.Si.



Deasi Nova, S.Si., Apt., M.K.M.



Dedi Candira Wijaya Kusuma, S.Sos., M.A.P.



dr. Sharlie Esa Kenedy, M.A.R.S.



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M.



Hermin Eko Purwanto, S.T.



Juli Jumatan Nuri, S.E.



M. Raimon Lauri AR, S.STP., M.Si.



Maryus Markus Firdaus, S.STP.



Musi Dayan, S.Si., M.A.P.



Rusli, S.E., Ak., M.M.



Suhermansyah, S.T., M.Eng.



# FASILITATOR



Dr. Ir. Bambang Budhianto



# RINGKASAN EKSEKUTIF



Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis secara nasional, yakni menyumbang 2,99% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 5,03%, sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,05%. Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Selatan juga masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian (24,60%) dan industri pengolahan (18,27%). **Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan jangka panjang** karena sifat sumber daya alam yang tidak terbarukan dan fluktuasi pasar komoditas global.

Untuk mengatasi kerentanan ini, **penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** menjadi langkah strategis untuk mendiversifikasi ekonomi. UMKM di Sumsel mendominasi 99,93% dari seluruh usaha non-pertanian dan menyerap sekitar 86% dari total tenaga kerja non-pertanian. UMKM juga terbukti memiliki ketahanan yang lebih tinggi saat terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19, karena **berbasis sumber daya lokal**.

Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya optimal karena menghadapi berbagai tantangan. **Tantangan utama** mencakup minimnya akses permodalan, di mana 91,86% UMKM tidak pernah menerima akses permodalan formal. Selain itu, ada keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya adopsi teknologi, dengan hanya 5,11% UMKM yang menggunakan komputer dan 7,01% yang memanfaatkan internet untuk usaha mereka. Tantangan lain adalah pemasaran yang terbatas dan belum optimalnya kemitraan antar-pelaku usaha.

Dokumen ini merekomendasikan serangkaian kebijakan untuk memperkuat UMKM secara holistik. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan akses permodalan, seperti melalui penyaluran dana bergulir dengan bunga rendah dan kolaborasi dengan lembaga keuangan, pengembangan kapasitas pelaku UMKM yang berkelanjutan dengan pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi produk serta percepatan adopsi teknologi dan digitalisasi usaha, melalui pelatihan, digital marketing dan penyediaan platform digital bersama.

Implementasi kebijakan ini harus melibatkan **kolaborasi multihelix** yang menyinergikan peran **pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media**. Melalui sinergi ini, diharapkan UMKM dapat menjadi fondasi ketahanan ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif dan adaptif di masa depan serta dapat mempertimbangkan pembentukan **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** baru yang berfungsi sebagai inkubator terpusat yang mengelola dana bergulir dan menyediakan platform digital, sehingga ekosistem UMKM di Sumatera Selatan dapat menjadi lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.



# PENDAHULUAN

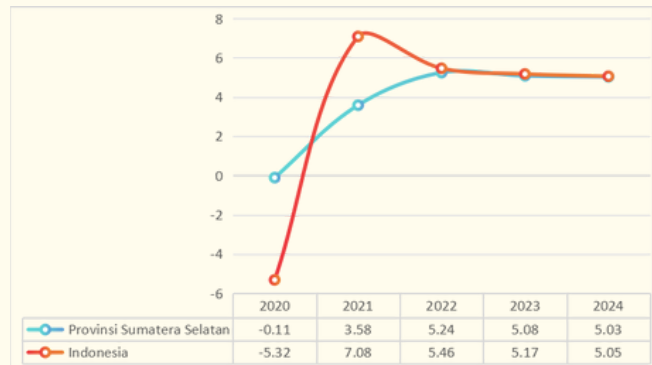


Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2024, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat sebesar 2,99%. Provinsi Sumatera Selatan juga menempati **posisi ke 5 lumbung pangan nasional** dan termasuk provinsi dengan **potensi sumber daya energi** yang besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, **pertumbuhan perekonomian** pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,08%. Capaian tersebut juga berada sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%.

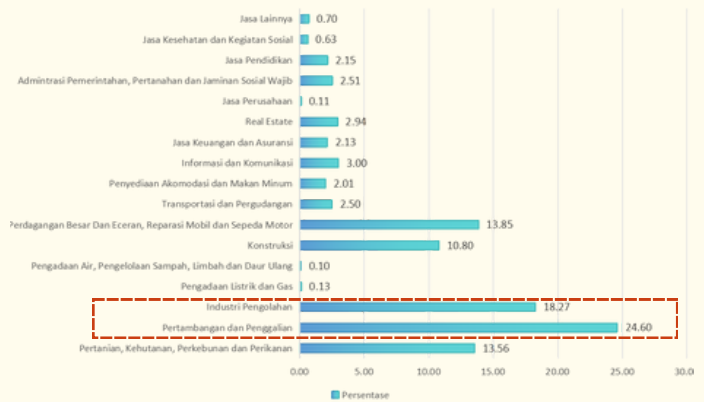
Adapun **struktur perekonomian** Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,60% dan industri pengolahan sebesar 18,27% sebagai penopang utama. Meski kedua sektor ini menyumbang PDRB yang besar, ketergantungan pada kedua sektor tersebut dapat menimbulkan kerentanan ekonomi dalam jangka panjang.

**Kerentanan sektor pertambangan dan penggalian**, dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan serta fluktuasi harga komoditas global. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, **kerentanan sektor industri pengolahan** masih bergantung pada bahan baku impor, teknologi luar negeri, dan pasar ekspor, sehingga rentan ketidakstabilan rantai pasok global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta gejolak ekonomi dunia.



**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumsel, 2020-2024)**

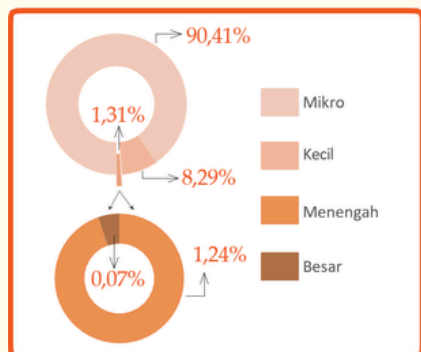
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025



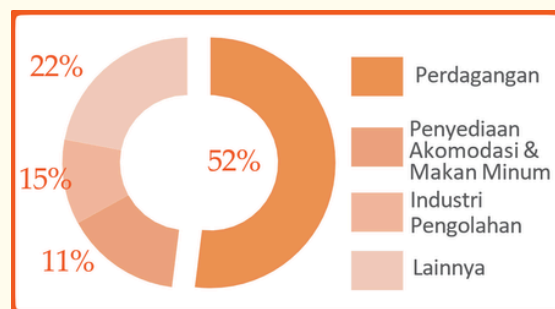
**Gambar 2. Distribusi Kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2025

Data Sensus Ekonomi BPS 2016 menunjukkan bahwa **UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Sumatera Selatan**, dengan kontribusinya didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 52%.



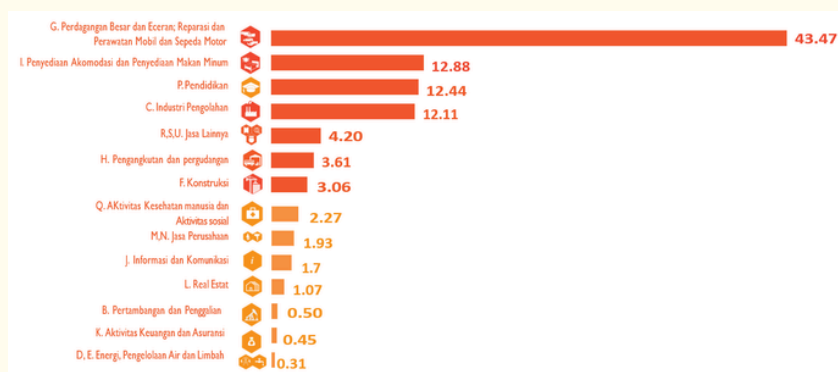
**Gambar 3. Persentase Usaha Menurut Pengelompokan Skala Usaha**  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016



**Gambar 4. Persentase Jumlah Usaha Mikro Kecil Tahun 2016**  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

**Jumlah UMK di Sumatera Selatan sangat besar yaitu** mencapai 98,70%. Usaha mikro mendominasi secara signifikan dengan persentase terbesar, yaitu 90.41% dan usaha kecil hanya menyumbang 8.29%. Sementara usaha menengah dan besar memiliki kontribusi yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,31%, masing-masing hanya 1,24% dan 0,07%. Besarnya persentase jumlah UMK di Sumatera Selatan menunjukkan UMK masih mampu bertahan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan rakyat dengan jumlahnya yang sangat besar dan sifatnya yang umumnya padat karya dan banyak menggunakan bahan baku lokal dan juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

**UMKM memiliki daya adaptasi lebih tinggi** dibandingkan korporasi besar yang dibuktikan daya tahan UMKM pada saat terjadi krisis pandemi covid-19. Hal ini disebabkan produk dan jasa UMKM dekat dengan kebutuhan masyarakat, berbasis sumber daya lokal, menggunakan modal relatif kecil, serta dapat dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa bergantung pada impor maupun investasi besar. Selain itu, UMKM juga berkontribusi menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja atau sekitar 86% dari total tenaga kerja nonpertanian.



**Gambar 5. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dalam Usaha Kecil Mikro Tahun 2016**  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Dengan demikian, UMKM dapat berperan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, menekan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan **pengoptimalan potensi pengembangan UMKM** agar dapat memperkuat ketahanan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.



# DESKRIPSI MASALAH



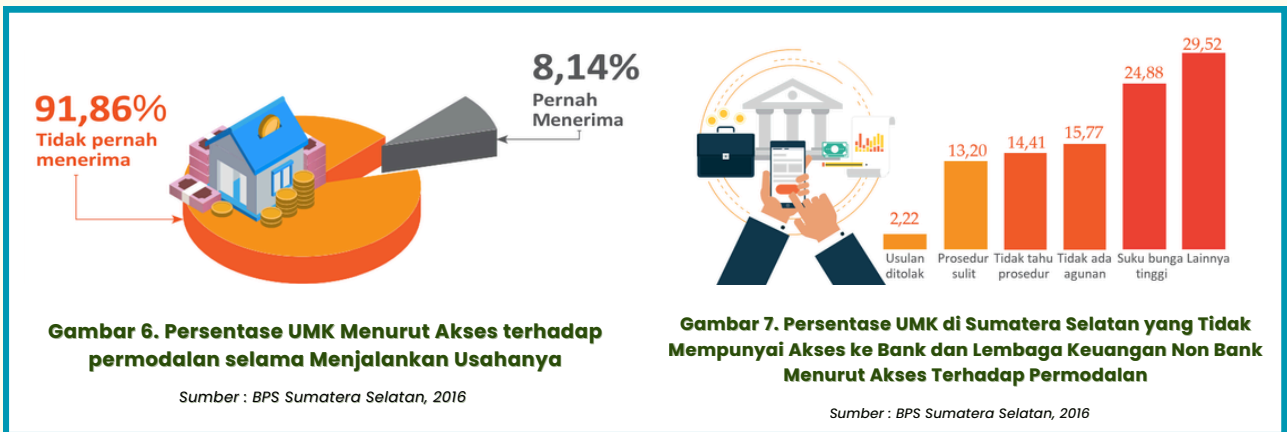
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali terhambat oleh berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Berdasarkan data Sensus Ekonomi BPS Tahun 2016, terdapat beberapa faktor krusial yang secara signifikan memperlambat laju pertumbuhan UMKM di Sumatera Selatan antara lain :

## 1. Minimnya Akses Permodalan

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Seperti diketahui bahwa usaha UMK mendominasi jumlah usaha. Dengan kapasitas usaha yang relatif kecil, permodalan usaha ini masih banyak menggunakan modal sendiri.

Hal ini menjadi salah satu permasalahan dimana terdapat beberapa hal yang menjadi akar masalah kondisi tersebut, yaitu:

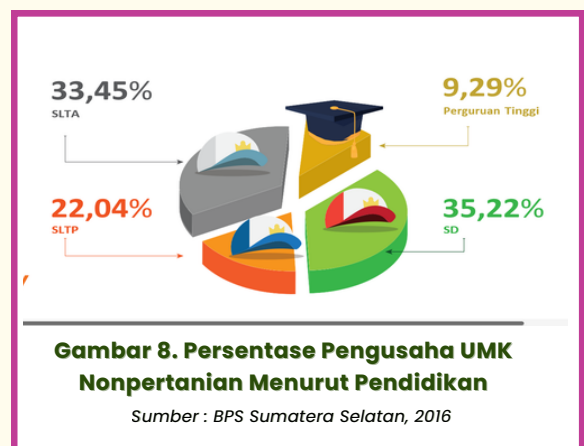
- Suku bunga yang relatif tinggi
- Persyaratan peminjaman yang rumit
- Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap literasi keuangan



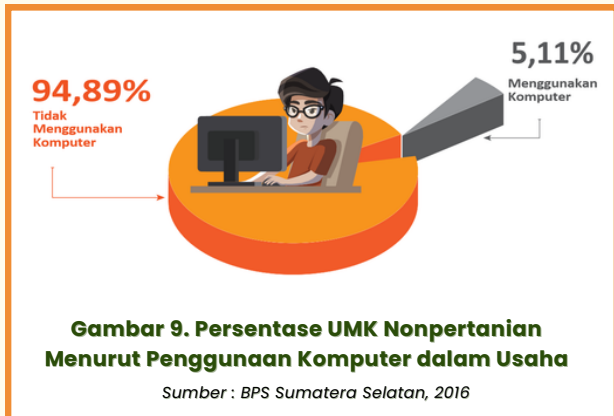
## 2. Keterbatasan Kualitas SDM

Kualitas SDM yang terbatas berdampak pada kurangnya kemampuan atau keahlian pelaku usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya secara optimal. Akar penyebab masalah ini yaitu :

- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan managerial
- Minimnya akses pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM
- Pelaku UMKM hanya berorientasi kepada produksi, bukan pada pengembangan bisnis



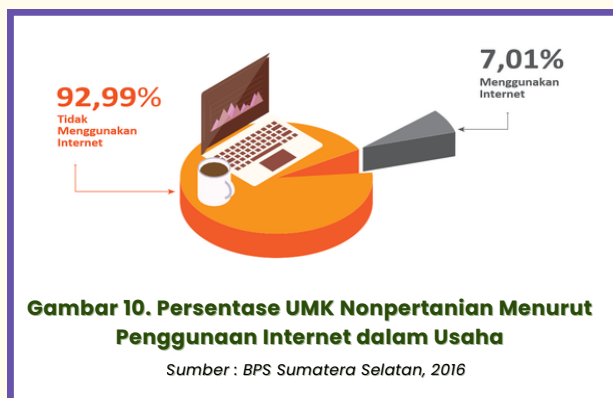
### 3. Keterbatasan Adopsi Teknologi



Keterbatasan adopsi teknologi menghambat perkembangan UMKM, dengan akar masalah yaitu :

- **Minimnya Literasi Digital** dimana banyak pelaku UMKM yang belum memahami pemanfaatan teknologi digital
- **Keterbatasan Pelaku UMK dalam mengalokasikan dana untuk investasi teknologi**

### 4. Pemasaran yang Terbatas



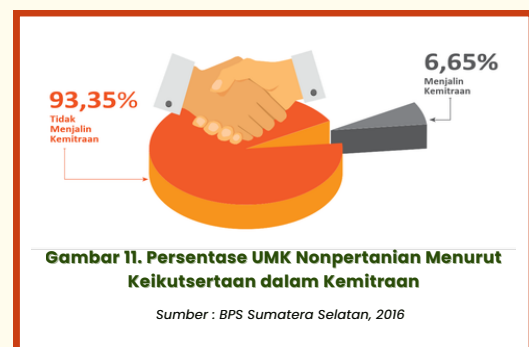
Keterbatasan pemasaran menjadi salah satu faktor utama yang menghambat UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Akar permasalahan tersebut, yaitu:

- **Tidak adanya strategi pemasaran yang terencana dan sistematis**
- **Kurangnya branding dan kemasan produk yang menarik**
- **UMKM hanya mengandalkan pasar lokal**

### 5. Belum Optimalnya Kemitraan UMKM

Kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan UMKM. Namun implementasi kemitraan UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya kolaborasi antara pelaku UMKM dengan mitra potensial seperti perusahaan besar, investor, maupun lembaga keuangan. Akar penyebab permasalahan ini yaitu :

- **Belum ada lembaga atau platform yang efektif sebagai fasilitator kemitraan**
- **Peran pemerintah yang belum optimal dalam berkoordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dalam mendorong kemitraan UMKM**
- **Belum adanya platform terpadu yang menjadi wadah *supply* dan *demand* dalam ekosistem kemitraan UMKM**



## 6. Kebijakan Pemerintah dan Pemda yang Diberlakukan

Kerangka regulasi nasional pada dasarnya telah menempatkan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menghadirkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui **Online Single Submission (OSS)** guna menyederhanakan prosedur legalisasi usaha dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 telah mewajibkan alokasi sekurang-kurangnya **40% belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM** dan koperasi. Pemerintah juga memperkuat akses permodalan melalui skema **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** dengan tingkat bunga rendah sebesar 6% per tahun.

Meskipun demikian, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit pelaku usaha mikro yang **enggan mendaftarkan NIB** karena adanya **kekhawatiran akan segera dikenakan kewajiban pajak**, meskipun sebenarnya terdapat ketentuan pajak yang lebih sederhana bagi UMKM. Selain itu, **keterbatasan literasi digital**, kesulitan dalam proses *onboarding* ke katalog elektronik pengadaan pemerintah, **penyaluran KUR yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha**.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk kelembagaan khusus melalui **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi dan UKM**, yang didukung dengan rencana strategis dan program pendampingan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha lokal. Secara keseluruhan, Balai ini bertindak sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan teknis dan praktis, memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dan bersaing.

Namun terdapat **tantangan dalam pengimplementasian** antara lain koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) yang belum optimal, keterbatasan jangkauan pendampingan, dan rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam legalisasi NIB akibat persepsi negatif terkait beban pajak. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya keterhubungan UMKM lokal ke dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun pasar modern. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah disusun dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih persuasif, edukatif, dan konsolidatif.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki organisasi nirlaba bernama **Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah)** yang menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan, pengembangan, dan promosi produk kerajinan daerah serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melestarikan warisan budaya lokal. Organisasi ini berperan penting dalam mengangkat kehidupan pengrajin dan meningkatkan daya saing produk kerajinan di tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun Dekranasda telah berhasil dalam mempromosikan produk UMKM, upaya ini **belum mampu menyelesaikan seluruh tantangan** yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan akses modal. Selain itu juga pengembangan pemasaran secara digital belum sepenuhnya aktif dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN



UMKM di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Untuk memastikan UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi signifikan pada perekonomian daerah, diperlukan formulasi kebijakan yang terintegrasi dan tepat sasaran. Berikut rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM :

## 1. PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI UMKM

Kebijakan ini berfokus pada kemudahan akses, diversifikasi sumber dana dan pendampingan finansial. Implementasinya dapat dilakukan melalui:



- **Penyaluran dana bergulir:** Pemprov Sumsel dapat membentuk lembaga atau badan khusus yang bertugas menyalurkan dana bergulir dengan bunga rendah (0%).
- **Kolaborasi dengan lembaga keuangan:** Pemprov Sumsel dapat menjalin kerja sama dengan bank daerah (BPD), bank swasta serta lembaga keuangan non-bank untuk menyediakan skema kredit khusus UMKM.
- **Pendampingan literasi keuangan:** Melalui program pelatihan, UMKM dibekali pengetahuan tentang cara membuat laporan keuangan sederhana, mengelola utang dan mengajukan pinjaman dengan benar.

## 2. PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU UMKM BERKELANJUTAN

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan keterampilan manajerial, teknis dan kewirausahaan. Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui:



- **Pelatihan berbasis kebutuhan:** Program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM di berbagai sektor. Misalnya, pelatihan pengemasan (packaging) yang menarik untuk produk makanan, atau pelatihan desain produk untuk kerajinan tangan.
- **Program pendampingan (mentoring):** Setelah pelatihan, setiap UMKM harus didampingi oleh mentor yang berpengalaman. Mentor ini bisa berasal dari kalangan akademisi, praktisi bisnis, atau wirausahawan senior yang sukses.
- **Fasilitas sertifikasi produk:** Pemprov Sumsel dapat membantu UMKM mendapatkan sertifikasi yang relevan, seperti sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), atau izin edar dari BPOM. Sertifikasi penting untuk meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.

### 3. AKSELERASI ADOPSI TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI UMKM

Adopsi teknologi dan digitalisasi adalah kunci agar UMKM dapat bersaing di era modern. Implementasinya dapat dilakukan melalui:

- **Pelatihan digital marketing:** Program ini akan membantu UMKM memahami cara memanfaatkan media sosial, e-commerce dan platform digital lainnya untuk pemasaran produk.
- **Penyediaan platform digital bersama:** Pemprov Sumsel dapat membangun platform atau direktori online khusus yang menampilkan produk-produk UMKM dari seluruh Sumatera Selatan. Platform ini akan mempermudah konsumen, baik di dalam maupun luar provinsi, untuk menemukan produk lokal.
- **Subsidi akses internet dan perangkat keras:** Untuk UMKM yang berada di wilayah minim akses, Pemprov Sumsel dapat memberikan subsidi untuk biaya internet atau bahkan menyediakan bantuan perangkat seperti laptop atau tablet.



Ketiga kebijakan ini diimplementasikan melalui **kolaborasi multihelix**, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media. Sinergi ini akan memperkuat program yang sudah ada, seperti program pada Dinas Koperasi dan UKM, UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UKM, Program 100.000 Sultan Muda dan program Dekranasda.

Adapun langkah terobosan untuk memastikan beberapa rekomendasi dan program di atas nantinya berjalan secara optimal, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertimbangkan pembentukan **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** baru yang berfungsi sebagai inkubator UMKM terpusat dengan mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai pembentukannya.



## KESIMPULAN



Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berada pada titik penting untuk melakukan transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam perlu diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi rakyat yang terbukti memiliki daya penting kuat, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM tidak hanya berperan sebagai penyangga kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai motor utama kemandirian ekonomi daerah, penyerap tenaga kerja terbesar, serta instrumen efektif dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, agar UMKM mampu berfungsi sebagai fondasi ketahanan ekonomi daerah, diperlukan perubahan paradigma kebijakan dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan ekosistem yang kolaboratif.

Langkah strategis yang perlu segera diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Membangun tata kelola pemberdayaan UMKM yang terintegrasi melalui pembentukan BUMD Inkubator UMKM sebagai pusat layanan terpadu yang mengelola dana bergulir, pengembangan kapasitas, serta digitalisasi usaha;
2. Meningkatkan kolaborasi multihelix (pemerintah–akademisi–dunia usaha–komunitas–media) sebagai mekanisme sinergi program, riset dan inovasi kebijakan daerah; serta
3. Memperkuat infrastruktur kebijakan digital dan regulasi afirmatif, termasuk insentif fiskal dan akses terhadap pasar publik daerah (local procurement) agar UMKM dapat terintegrasi kedalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas.

Dengan arah kebijakan tersebut, UMKM diharapkan tidak lagi sekedar bertahan, melainkan menjadi fondasi utama ketahanan ekonomi lokal yang produktif, adaptif terhadap perubahan global dan berkontribusi nyata terhadap visi pembangunan ekonomi Sumatera Selatan yang berdaya saing dan berkelanjutan.



## REFERENSI



- Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2025
- Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Sensus Ekonomi Tahun 2016
- Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Selatan, Sensus Ekonomi Tahun 2017



## **PKN TK II ANGKATAN XXI TAHUN 2025**

